



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan Persetujuan bersama Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan.

BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a) Semula	Rp. 932.304.108.372,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 194.548.338.899,31</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 1.126.852.447.271,31</u>
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 960.904.108.372,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 290.840.970.252,55</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.251.745.078.624,55</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		<u>(Rp. 124.892.631.353,24)</u>
3. Pembiayaan		
Penerimaan		
a) Semula	Rp. 28.600.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 96.292.631.353,24</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 124.892.631.353,24</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp. 124.892.631.353,24</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.		0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran Ia Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;
2. Lampiran Ila Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

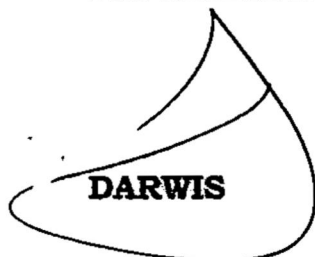
Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 14 September 2016

BUPATI BATU BARA,


OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 14 September 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,


DARWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RAHMAD SIRAIT
NIP. 19660707 198602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	932.304.108.372,00	1.126.852.447.271,31	194.548.338.899,31	20,87	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.426.644.624,00	54.612.813.928,31	4.186.169.304,31	8,30	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.272.500.000,00	23.272.500.000,00	1.000.000.000,00	4,49	
4.1.1.01	Pajak Hotel	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.03	Pajak Hiburan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.05	Pameran	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.04	Pajak Reklame	400.500.000,00	400.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	360.500.000,00	360.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.04.02	Reklame Kain	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	12.856.251.500,00	13.856.251.500,00	1.000.000.000,00	7,78	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.856.251.500,00	13.856.251.500,00	1.000.000.000,00	7,78	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.06.28	Pasir Kuarsa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.1.07	Pajak Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	400.500.000,00	400.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	400.500.000,00	400.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	8.250.500,00	8.250.500,00	0,00	0,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	8.250.500,00	8.250.500,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.484.498.000,00	5.484.498.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	5.484.498.000,00	5.484.498.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.500.000,00	1.200.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	1.200.500.000,00	1.200.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.563.500.000,00	5.568.000.000,00	(1.995.500.000,00)	(26,38)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.400.000.000,00	3.200.000.000,00	(200.000.000,00)	(5,88)	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	700.000.000,00	500.000.000,00	(200.000.000,00)	(28,57)	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010
4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.405.500.000,00	1.220.000.000,00	(185.500.000,00)	(13,20)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat pelelangan Ternak	65.500.000,00	20.000.000,00	(45.500.000,00)	(69,47)	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.1.2.02.22	Retribusi Tempat Pariwisata	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.758.000.000,00	1.148.000.000,00	(1.610.000.000,00)	(58,38)	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin mendirikan Bangunan	1.058.000.000,00	558.000.000,00	(500.000.000,00)	(47,26)	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	1.600.000.000,00	390.000.000,00	(1.210.000.000,00)	(75,63)	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010
4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Kab.Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.590.644.624,00	25.772.313.928,31	5.181.669.304,31	25,17	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	7.090.644.624,00	5.000.000.000,00	(2.090.644.624,00)	(29,48)	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	7.090.644.624,00	5.000.000.000,00	(2.090.644.624,00)	(29,48)	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	4.022.313.928,31	4.022.313.928,31	0,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	0,00	4.022.313.928,31	4.022.313.928,31	0,00	
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013
4.1.4.25	Pendapatan Dana Klaim BPJS	0,00	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	
4.1.4.25.01	Pendapatan Dana Klaim BPJS	0,00	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	671.733.838.000,00	911.835.387.000,00	240.101.549.000,00	35,74	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.880.463.000,00	28.160.543.000,00	(719.920.000,00)	(2,49)	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	26.577.295.000,00	25.970.951.000,00	(606.344.000,00)	(2,28)	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	10.708.720.000,00	12.737.025.000,00	2.028.305.000,00	18,94	
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	15.868.575.000,00	13.018.852.000,00	(2.849.723.000,00)	(17,96)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	215.074.000,00	215.074.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.302.168.000,00	2.189.592.000,00	(113.576.000,00)	(4,93)	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	769.688.000,00	155.038.000,00	(614.650.000,00)	(79,86)	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	915.093.000,00	1.089.194.000,00	174.101.000,00	19,03	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	77.370.000,00	62.341.000,00	(15.029.000,00)	(19,42)	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	115.700.000,00	101.504.000,00	(14.196.000,00)	(12,27)	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	14.970.000,00	15.050.000,00	80.000,00	0,53	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	410.347.000,00	0,00	(410.347.000,00)	(100,00)	
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Mineral dan Batubara	0,00	766.465.000,00	766.465.000,00	0,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	578.874.665.000,00	613.236.956.000,00	34.362.291.000,00	5,94	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	578.874.665.000,00	613.236.956.000,00	34.362.291.000,00	5,94	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	578.874.665.000,00	613.236.956.000,00	34.362.291.000,00	5,94	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	63.978.710.000,00	270.437.888.000,00	206.459.178.000,00	322,70	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	63.978.710.000,00	270.437.888.000,00	206.459.178.000,00	322,70	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	28.266.870.000,00	2.009.160.000,00	(26.257.710.000,00)	(92,89)	
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	6.858.410.000,00	10.747.220.000,00	3.888.810.000,00	56,70	
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	9.264.600.000,00	0,00	(9.264.600.000,00)	(100,00)	
4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	2.709.120.000,00	0,00	(2.709.120.000,00)	(100,00)	
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1.855.130.000,00	324.590.000,00	(1.530.540.000,00)	(82,50)	
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.014.970.000,00	265.580.000,00	(749.390.000,00)	(73,83)	
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	4.255.090.000,00	832.700.000,00	(3.422.390.000,00)	(80,43)	
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	4.371.830.000,00	2.549.680.000,00	(1.822.150.000,00)	(41,68)	
4.2.3.01.10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	739.990.000,00	545.190.000,00	(194.800.000,00)	(26,32)	
4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.083.100.000,00	422.280.000,00	(660.820.000,00)	(61,01)	
4.2.3.01.12	DAK Bidang Kehutanan	1.257.830.000,00	0,00	(1.257.830.000,00)	(100,00)	
4.2.3.01.14	DAK Bidang Perdagangan	1.865.300.000,00	0,00	(1.865.300.000,00)	(100,00)	
4.2.3.01.15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	436.470.000,00	0,00	(436.470.000,00)	(100,00)	
4.2.3.01.20	DAK Bidang Perhubungan	0,00	154.690.000,00	154.690.000,00	0,00	
4.2.3.01.21	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	0,00	385.150.000,00	385.150.000,00	0,00	
4.2.3.01.22	DAK Bidang Jalan	0,00	84.081.200.000,00	84.081.200.000,00	0,00	
4.2.3.01.26	DAK Infrastruktur Publik Daerah	0,00	35.743.870.000,00	35.743.870.000,00	0,00	
4.2.3.01.28	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	4.872.000.000,00	4.872.000.000,00	0,00	
4.2.3.01.29	DAK Tunjangan Profesi Guru	0,00	120.909.459.000,00	120.909.459.000,00	0,00	
4.2.3.01.30	DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	642.700.000,00	642.700.000,00	0,00	
4.2.3.01.31	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	3.894.719.000,00	3.894.719.000,00	0,00	
4.2.3.01.33	DAK Akreditasi Puskesmas	0,00	347.840.000,00	347.840.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.3.01.34	DAK Jaminan Persalinan	0,00	1.411.510.000,00	1.411.510.000,00	0,00	
4.2.3.01.35	DAK Bantuan Operasional KB	0,00	298.350.000,00	298.350.000,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	210.143.625.748,00	160.404.246.343,00	(49.739.379.405,00)	(23,67)	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.426.466.748,00	63.606.377.259,00	22.179.910.511,00	53,54	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.426.466.748,00	63.606.377.259,00	22.179.910.511,00	53,54	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.972.927.293,00	9.664.998.513,00	3.692.071.220,00	61,81	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.240.002.886,00	8.031.369.244,00	(208.633.642,00)	(2,53)	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.074.193.562,00	22.812.146.470,00	(3.262.047.092,00)	(12,51)	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	348.968.584,00	385.909.279,00	36.940.695,00	10,59	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Retribusi Tera Ulang Metrologi Pengujian Barang	0,00	14.299.290,00	14.299.290,00	0,00	
4.3.3.01.09	Bagi Hasil Dari Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.10	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	790.374.423,00	22.697.654.463,00	21.907.280.040,00	2.771,76	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144.371.384.000,00	89.109.409.000,00	(55.261.975.000,00)	(38,28)	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	144.371.384.000,00	89.109.409.000,00	(55.261.975.000,00)	(38,28)	
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	103.463.924.000,00	0,00	(103.463.924.000,00)	(100,00)	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.3.4.01.06	Dana Desa	39.707.460.000,00	89.109.409.000,00	49.401.949.000,00	124,41	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24.345.775.000,00	7.688.460.084,00	(16.657.314.916,00)	(68,42)	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	24.345.775.000,00	7.688.460.084,00	(16.657.314.916,00)	(68,42)	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	24.345.775.000,00	7.688.460.084,00	(16.657.314.916,00)	(68,42)	
5	BELANJA	960.904.108.372,00	1.251.745.078.624,55	290.840.970.252,55	30,27	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	540.943.621.529,00	678.153.776.108,55	137.210.154.579,55	25,36	
5.1.1	Belanja Pegawai	472.983.953.418,00	509.913.434.544,55	36.929.481.126,55	7,81	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	326.255.792.745,00	465.213.849.471,55	138.958.056.726,55	42,59	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	234.445.456.130,65	235.854.426.916,20	1.408.970.785,55	0,60	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	22.251.672.786,26	22.715.629.998,76	463.957.212,50	2,09	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	9.928.586.055,00	10.304.226.450,00	375.640.395,00	3,78	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.424.607.950,00	15.696.792.587,00	(727.815.363,00)	(4,43)	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	8.798.091.187,50	3.883.156.260,50	(4.914.934.927,00)	(55,86)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	14.776.294.037,75	14.875.738.420,75	99.444.383,00	0,67	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.060.388.327,92	5.544.546.537,92	(2.515.841.790,00)	(31,21)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	49.621.568,11	56.736.026,41	7.114.458,00	14,34	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.467.050.378,51	7.521.775.393,51	54.725.015,00	0,73	
5.1.1.01.10	Uang Paket	210.338.000,00	210.338.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	102.788.575,00	102.788.575,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	156.074.725,00	156.074.725,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	156.788.575,00	156.788.575,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	56.604.473,00	56.604.473,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	70.691.575,00	70.691.575,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.968.438.400,00	1.968.438.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	15.600.000,00	249.600.000,00	234.000.000,00	1.500,00	
5.1.1.01.21	Iuran JKK	476.650.000,00	539.327.502,25	62.677.502,25	13,15	
5.1.1.01.22	Iuran JKM	590.050.000,00	678.507.555,25	88.457.555,25	14,99	
5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	2.744.950.000,00	2.744.950.000,00	0,00	
5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	141.576.711.500,00	141.576.711.500,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	142.836.063.503,00	40.988.033.903,00	(101.848.029.600,00)	(71,30)	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	28.455.192.650,00	31.029.202.100,00	2.574.009.450,00	9,05	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	519.600.000,00	545.580.000,00	25.980.000,00	5,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.334.810.000,00	1.374.740.000,00	39.930.000,00	2,99	
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	112.446.960.853,00	7.959.011.803,00	(104.487.949.050,00)	(92,92)	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.141.520.000,00	2.288.520.000,00	147.000.000,00	6,86	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.894.000.000,00	2.041.000.000,00	147.000.000,00	7,76	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	247.520.000,00	247.520.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	327.546.000,00	0,00	(327.546.000,00)	(100,00)	
5.1.1.04.04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	327.546.000,00	0,00	(327.546.000,00)	(100,00)	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.123.031.170,00	1.123.031.170,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.123.031.170,00	1.123.031.170,00	0,00	0,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	6.663.440.000,00	13.259.659.000,00	6.596.219.000,00	98,99	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	6.663.440.000,00	7.213.519.000,00	550.079.000,00	8,26	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	6.663.440.000,00	7.213.519.000,00	550.079.000,00	8,26	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	1.210.140.000,00	1.210.140.000,00	0,00	
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	1.210.140.000,00	1.210.140.000,00	0,00	
5.1.4.08	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	4.836.000.000,00	4.836.000.000,00	0,00	
5.1.4.08.01	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	4.836.000.000,00	4.836.000.000,00	0,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.055.000.000,00	0,00	(2.055.000.000,00)	(100,00)	
5.1.5.05	Belanja Bantuan Pendamping PNPM	2.055.000.000,00	0,00	(2.055.000.000,00)	(100,00)	
5.1.5.05.01	Belanja Bantuan Pendamping PNPM	2.055.000.000,00	0,00	(2.055.000.000,00)	(100,00)	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provisi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	58.741.228.111,00	154.480.682.564,00	95.739.454.453,00	162,99	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	39.707.460.000,00	89.403.259.400,00	49.695.799.400,00	125,15	
5.1.7.03.02	Belanja Dana Desa	39.707.460.000,00	89.403.259.400,00	49.695.799.400,00	125,15	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	18.272.111.947,00	64.315.767.000,00	46.043.655.053,00	251,99	
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	18.272.111.947,00	64.315.767.000,00	46.043.655.053,00	251,99	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	761.656.164,00	761.656.164,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	761.656.164,00	761.656.164,00	0,00	0,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	419.960.486.843,00	573.591.302.516,00	153.630.815.673,00	36,58	
5.2.1	Belanja Pegawai	40.125.808.415,00	42.756.136.595,00	2.630.328.180,00	6,56	
5.2.1.01	Honorarium PNS	9.712.467.015,00	12.331.645.015,00	2.619.178.000,00	26,97	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.298.337.015,00	6.693.295.015,00	1.394.958.000,00	26,33	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.036.360.000,00	679.220.000,00	(357.140.000,00)	(34,46)	
5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	6.200.000,00	(6.400.000,00)	(50,79)	
5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	3.365.170.000,00	4.952.930.000,00	1.587.760.000,00	47,18	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.120.216.400,00	28.434.691.580,00	2.314.475.180,00	8,86	
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	397.150.000,00	330.350.000,00	(66.800.000,00)	(16,82)	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	17.133.318.400,00	18.444.283.580,00	1.310.965.180,00	7,65	
5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS Lainnya	8.589.748.000,00	9.660.058.000,00	1.070.310.000,00	12,46	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.03	Uang Lembur	516.050.000,00	469.250.000,00	(46.800.000,00)	(9,07)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	439.050.000,00	469.250.000,00	30.200.000,00	6,88	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	77.000.000,00	0,00	(77.000.000,00)	(100,00)	
5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.743.825.000,00	1.487.300.000,00	(2.256.525.000,00)	(60,27)	
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	2.578.845.000,00	526.000.000,00	(2.052.845.000,00)	(79,60)	
5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.164.980.000,00	961.300.000,00	(203.680.000,00)	(17,48)	
5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.06.01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.06.02	Moderator	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.022.774.637,00	200.245.602.697,00	35.222.828.060,00	21,34	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.098.833.020,00	10.942.890.339,00	844.057.319,00	8,36	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.638.141.875,00	5.390.971.574,00	752.829.699,00	16,23	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	744.014.000,00	770.714.000,00	26.700.000,00	3,59	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.737.880,00	313.413.500,00	12.675.620,00	4,21	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	869.634.465,00	901.496.465,00	31.862.000,00	3,66	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.374.904.800,00	3.394.894.800,00	19.990.000,00	0,59	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan Olah raga	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.570.308.074,00	16.762.269.799,00	1.191.961.725,00	7,66	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	478.500.000,00	551.500.000,00	73.000.000,00	15,26	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	235.378.000,00	207.928.000,00	(27.450.000,00)	(11,66)	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	611.240.000,00	1.064.903.625,00	453.663.625,00	74,22	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	964.017.150,00	3.449.857.150,00	2.485.840.000,00	257,86	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	420.418.000,00	528.028.000,00	107.610.000,00	25,60	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Material Lainnya	12.860.754.924,00	10.960.053.024,00	(1.900.701.900,00)	(14,78)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.968.910.364,00	30.677.290.439,00	6.708.380.075,00	27,99	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	824.640.000,00	835.083.000,00	10.443.000,00	1,27	
5.2.2.03.02	Belanja Air	55.420.000,00	84.420.000,00	29.000.000,00	52,33	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.204.496.234,00	8.171.915.245,00	967.419.011,00	13,43	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.529.860.000,00	1.532.160.000,00	2.300.000,00	0,15	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	862.900.000,00	1.228.648.064,00	365.748.064,00	42,39	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	90.250.000,00	265.000.000,00	174.750.000,00	193,63	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.353.792.231,00	7.441.792.231,00	3.088.000.000,00	70,93	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/I:arasumber	7.663.613.299,00	9.266.633.299,00	1.603.020.000,00	20,92	
5.2.2.03.14	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.250.038.600,00	1.684.738.600,00	434.700.000,00	34,77	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi	44.000.000,00	77.000.000,00	33.000.000,00	75,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	16.746.720.000,00	3.671.880.000,00	(13.074.840.000,00)	(78,07)	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	16.746.720.000,00	3.671.880.000,00	(13.074.840.000,00)	(78,07)	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.298.691.336,00	12.583.154.346,00	284.463.010,00	2,31	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.369.143.852,00	2.199.705.400,00	(169.438.452,00)	(7,15)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.657.117.871,00	4.161.453.871,00	504.336.000,00	13,79	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.643.044.013,00	5.548.403.245,00	(94.640.768,00)	(1,68)	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	581.385.600,00	589.591.830,00	8.206.230,00	1,41	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	93,75	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.000.000,00	53.000.000,00	21.000.000,00	65,63	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.528.648.084,00	10.695.634.264,00	2.166.986.180,00	25,41	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.049.666.495,00	7.704.789.595,00	1.655.123.100,00	27,36	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.187.829.944,00	2.651.551.024,00	463.721.080,00	21,20	
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	291.151.645,00	339.293.645,00	48.142.000,00	16,54	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.031.621.185,00	2.204.103.085,00	1.172.481.900,00	113,65	
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	128.157.000,00	128.157.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	563.917.950,00	1.551.749.850,00	987.831.900,00	175,17	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	327.546.235,00	512.196.235,00	184.650.000,00	56,37	
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	17.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	949.480.000,00	971.344.000,00	21.864.000,00	2,30	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	894.780.000,00	914.844.000,00	20.064.000,00	2,24	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	37.900.000,00	46.300.000,00	8.400.000,00	22,16	
5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	16.800.000,00	10.200.000,00	(6.600.000,00)	(39,29)	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.091.655.800,00	2.185.543.550,00	93.887.750,00	4,49	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	314.806.900,00	335.713.100,00	20.906.200,00	6,64	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	240.482.000,00	248.982.000,00	8.500.000,00	3,53	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	568.512.000,00	626.412.000,00	57.900.000,00	10,18	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	35.907.000,00	35.907.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	566.822.900,00	624.431.450,00	57.608.550,00	10,16	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Stand	152.180.000,00	175.308.000,00	23.128.000,00	15,20	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Lainnya	212.945.000,00	138.790.000,00	(74.155.000,00)	(34,82)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.448.118.039,00	17.339.944.961,00	4.891.826.922,00	39,30	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.397.920.000,00	1.624.020.000,00	226.100.000,00	16,17	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.921.565.918,00	3.496.994.748,00	575.428.830,00	19,70	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.836.316.600,00	1.911.601.600,00	75.285.000,00	4,10	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	449.255.000,00	503.572.500,00	54.317.500,00	12,09	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.843.060.521,00	9.803.756.113,00	3.960.695.592,00	67,78	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	932.080.000,00	1.393.555.000,00	461.475.000,00	49,51	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	15.000.000,00	105.000.000,00	90.000.000,00	600,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	153.125.000,00	153.125.000,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	811.150.000,00	976.900.000,00	165.750.000,00	20,43	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	94.080.000,00	94.080.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.06	Belanja Atribut	11.850.000,00	15.450.000,00	3.600.000,00	30,38	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	555.270.000,00	783.445.000,00	228.175.000,00	41,09	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	555.270.000,00	783.445.000,00	228.175.000,00	41,09	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.481.143.500,00	2.103.128.500,00	(378.015.000,00)	(15,24)	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	520.000.000,00	0,00	(520.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	201.800.000,00	239.300.000,00	37.500.000,00	18,58	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisionai	340.536.000,00	390.536.000,00	50.000.000,00	14,68	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	865.507.500,00	913.102.500,00	47.595.000,00	5,50	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Pasukibraka	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	517.300.000,00	524.190.000,00	6.890.000,00	1,33	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.641.120.625,00	28.955.925.844,00	6.314.805.219,00	27,89	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.043.144.000,00	6.179.429.000,00	2.136.285.000,00	52,84	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.567.976.625,00	22.746.496.844,00	4.178.520.219,00	22,50	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	186.000.000,00	184.750.000,00	(1.250.000,00)	(0,67)	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	66.000.000,00	74.000.000,00	8.000.000,00	12,12	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	120.000.000,00	110.750.000,00	(9.250.000,00)	(7,71)	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.914.636.000,00	4.699.575.000,00	784.939.000,00	20,05	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.402.115.000,00	1.703.054.000,00	300.939.000,00	21,46	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	87.000.000,00	115.000.000,00	28.000.000,00	32,18	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	2.425.521.000,00	2.981.521.000,00	456.000.000,00	18,80	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.463.212.685,00	5.193.136.485,00	729.923.800,00	16,35	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	941.385.000,00	1.481.385.000,00	540.000.000,00	57,36	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	461.144.000,00	454.544.000,00	(6.600.000,00)	(1,43)	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.684.867.000,00	1.686.441.000,00	1.574.000,00	0,09	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	156.316.685,00	151.266.485,00	(5.050.200,00)	(3,23)	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.219.500.000,00	1.419.500.000,00	200.000.000,00	16,40	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.293.467.000,00	3.222.170.000,00	928.703.000,00	40,49	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.588.088.000,00	2.299.708.430,00	711.620.430,00	44,81	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	705.379.000,00	872.461.570,00	167.082.570,00	23,69	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.979.467.365,00	20.032.905.525,00	6.053.438.160,00	43,30	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.494.805.290,00	17.739.643.450,00	6.244.838.160,00	54,33	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.484.662.075,00	2.293.262.075,00	(191.400.000,00)	(7,70)	
5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasu Jaminan Kesehatan Nasional	3.001.500.000,00	16.501.500.000,00	13.500.000.000,00	449,78	
5.2.2.25.01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasu Jaminan Kesehatan Nasional	3.001.500.000,00	16.501.500.000,00	13.500.000.000,00	449,78	
5.2.2.26	Belanja transportasi dan akomodasi	6.643.891.560,00	8.933.456.560,00	2.289.565.000,00	34,46	
5.2.2.26.01	Belanja transportasi	5.963.708.000,00	7.706.493.000,00	1.742.785.000,00	29,22	
5.2.2.26.02	Belanja akomodasi	680.183.560,00	1.226.963.560,00	546.780.000,00	80,39	
5.2.3	Belanja Modal	214.811.903.791,00	330.589.563.224,00	115.777.659.433,00	53,90	
5.2.3.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.10.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.834.152.862,00	250.000.000,00	(3.584.152.862,00)	(93,48)	
5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	3.834.152.862,00	0,00	(3.834.152.862,00)	(100,00)	
5.2.3.11.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	128.750.000,00	352.558.000,00	223.808.000,00	173,83	
5.2.3.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	102.650.000,00	102.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	26.100.000,00	49.908.000,00	23.808.000,00	91,22	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.466.033.363,00	8.083.530.825,00	3.617.497.462,00	81,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	231.760.000,00	385.150.000,00	153.390.000,00	66,22	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	900.000.000,00	1.296.600.000,00	396.600.000,00	44,07	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.121.353.363,00	5.027.180.825,00	2.905.827.462,00	136,98	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	972.900.000,00	1.184.600.000,00	211.700.000,00	21,76	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	194.000.000,00	234.000.000,00	40.000.000,00	20,62	
5.2.3.19.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.19.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
5.2.3.22.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	61.720.000,00	61.720.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	61.720.000,00	61.720.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.044.936.589,00	1.522.436.589,00	477.500.000,00	45,70	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	48.500.000,00	58.900.000,00	10.400.000,00	21,44	
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	7.320.000,00	27.320.000,00	20.000.000,00	273,22	
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	107.250.000,00	88.250.000,00	464,47	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	934.116.589,00	1.292.966.589,00	358.850.000,00	38,42	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.575.783.040,00	2.698.327.215,00	1.122.544.175,00	71,24	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	932.803.140,00	1.472.603.140,00	539.800.000,00	57,87	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	105.725.000,00	92.250.000,00	(13.475.000,00)	(12,75)	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	292.194.900,00	576.594.900,00	284.400.000,00	97,33	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	154.460.000,00	391.460.000,00	237.000.000,00	153,44	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	74.819.175,00	74.819.175,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.700.369.000,00	2.347.817.000,00	647.448.000,00	38,08	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	65.000.000,00	118.800.000,00	53.800.000,00	82,77	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	870.280.000,00	1.126.980.000,00	256.700.000,00	29,50	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	128.800.000,00	272.800.000,00	144.000.000,00	111,80	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	358.289.000,00	544.937.000,00	186.648.000,00	52,09	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	213.000.000,00	219.300.000,00	6.300.000,00	2,96	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	652.742.300,00	1.775.192.300,00	1.122.450.000,00	171,96	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	204.730.000,00	857.730.000,00	653.000.000,00	318,96	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	94.250.000,00	119.250.000,00	25.000.000,00	26,53	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	99.850.000,00	354.600.000,00	254.750.000,00	255,13	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	28.062.300,00	23.062.300,00	(5.000.000,00)	(17,82)	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	207.850.000,00	402.550.000,00	194.700.000,00	93,67	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	225.830.500,00	525.330.500,00	299.500.000,00	132,62	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	97.118.000,00	147.618.000,00	50.500.000,00	52,00	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	108.000.000,00	357.000.000,00	249.000.000,00	230,56	
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	20.712.500,00	20.712.500,00	0,00	0,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	2.500.000,00	7.000.000,00	4.500.000,00	180,00	
5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	2.500.000,00	7.000.000,00	4.500.000,00	180,00	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	681.676.000,00	985.262.824,00	303.586.824,00	44,54	
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	681.676.000,00	985.262.824,00	303.586.824,00	44,54	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	24.000.000,00	308.000.000,00	284.000.000,00	1.183,33	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
5.2.3.36.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	24.000.000,00	38.000.000,00	14.000.000,00	58,33	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	26.000.000,00	1.346.000.000,00	1.320.000.000,00	5.076,92	
5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Kepampilan Lain-lain	0,00	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	
5.2.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.2.3.39.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5.2.3.42.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	161.000.000,00	166.500.000,00	5.500.000,00	3,42	
5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	161.000.000,00	166.500.000,00	5.500.000,00	3,42	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.953.263.137,00	31.720.902.040,00	(20.232.351.097,00)	(38,94)	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	13.718.125.500,00	9.230.906.500,00	(4.487.219.000,00)	(32,71)	
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	1.865.300.000,00	1.287.317.176,00	(577.982.824,00)	(30,99)	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	645.900.637,00	4.858.370.700,00	4.212.470.063,00	652,19	
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	361.700.000,00	361.700.000,00	0,00	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	31.372.870.000,00	7.525.218.800,00	(23.847.651.200,00)	(76,01)	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	762.870.000,00	762.870.000,00	0,00	
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	326.052.000,00	326.052.000,00	0,00	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.110.750.000,00	1.138.650.000,00	27.900.000,00	2,51	


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.240.000.000,00	6.229.816.864,00	2.989.816.864,00	92,28	
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	203.690.000,00	202.690.000,00	(1.000.000,00)	(0,49)	
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	155.690.000,00	154.690.000,00	(1.000.000,00)	(0,64)	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	67.294.250.000,00	183.013.483.731,00	115.719.233.731,00	171,96	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	39.722.000.000,00	153.080.981.871,00	113.358.981.871,00	285,38	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	14.890.000.000,00	15.140.600.000,00	250.600.000,00	1,68	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	199.178.000,00	199.178.000,00	0,00	
5.2.3.59.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Turap/talud/Bronjong	12.682.250.000,00	14.592.723.860,00	1.910.473.860,00	15,06	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	31.274.200.000,00	29.857.503.046,00	(1.416.696.954,00)	(4,53)	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	29.624.200.000,00	28.207.503.046,00	(1.416.696.954,00)	(4,78)	
5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	21.015.550.000,00	27.850.730.000,00	6.835.180.000,00	32,52	
5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	4.666.250.000,00	11.579.250.000,00	6.913.000.000,00	148,15	
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.700.000.000,00	4.459.580.000,00	(240.420.000,00)	(5,12)	
5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	10.140.000.000,00	10.302.600.000,00	162.600.000,00	1,60	
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	1.509.300.000,00	1.509.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	11.873.750.000,00	11.912.770.000,00	39.020.000,00	0,33	
5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	11.873.750.000,00	11.737.770.000,00	(135.980.000,00)	(1,15)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.64.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	200.000.000,00	571.461.000,00	371.461.000,00	185,73	
5.2.3.65.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.65.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0,00	371.461.000,00	371.461.000,00	0,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	107.378.000,00	107.378.000,00	0,00	
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	107.378.000,00	107.378.000,00	0,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.146.916.100,00	0,00	(1.146.916.100,00)	(100,00)	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.146.916.100,00	0,00	(1.146.916.100,00)	(100,00)	
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	6.240.000.000,00	6.314.300.000,00	74.300.000,00	1,19	
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	6.240.000.000,00	6.314.300.000,00	74.300.000,00	1,19	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.109.143.000,00	1.149.590.000,00	40.447.000,00	3,65	
5.2.3.69.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.109.143.000,00	1.053.590.000,00	(55.553.000,00)	(5,01)	
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.502.153.900,00	8.150.000.000,00	6.647.846.100,00	442,55	
5.2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah	1.502.153.900,00	8.150.000.000,00	6.647.846.100,00	442,55	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.035.000.000,00	1.835.206.375,00	800.206.375,00	77,31	
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	1.032.000.000,00	1.835.206.375,00	803.206.375,00	77,83	
5.2.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.80.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	219.750.000,00	1.592.356.779,00	1.372.606.779,00	624,62	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	209.750.000,00	1.582.356.779,00	1.372.606.779,00	654,40	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	2.255.564.000,00	2.702.290.000,00	446.726.000,00	19,81	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	2.255.564.000,00	2.702.290.000,00	446.726.000,00	19,81	
5.2.3.90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.422.730.000,00	1.233.777.000,00	(188.953.000,00)	(13,28)	
5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.422.730.000,00	1.233.777.000,00	(188.953.000,00)	(13,28)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.600.000.000,00)	(124.892.631.353,24)	(96.292.631.353,24)	336,69	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.600.000.000,00	124.892.631.353,24	96.292.631.353,24	336,69	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.600.000.000,00	124.892.631.353,24	96.292.631.353,24	336,69	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.600.000.000,00	124.892.631.353,24	96.292.631.353,24	336,69	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.600.000.000,00	124.892.631.353,24	96.292.631.353,24	336,69	
	PEMBIAYAAN NETTO	28.600.000.000,00	124.892.631.353,24	96.292.631.353,24	336,69	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Lima Puluh, 14 September 2016
 BUPATI BATU BARA



OK. ARYA ZULKARNAIN, SH., MM.